BAB II

**KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN “ENKASAU” PADA
MASYARAKAT DAYAK BIDAYU DI DESA ENTABANG
KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upacara Adat Perkawinan

Membicarakan masalah perkawinan berarti membicarakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia dimuka bumi ini. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menjadi calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara – saudaranya bahkan keluarga – keluarga mereka masing-masing.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat, perkawinan itu bukan hanya peristiwa yang melibatkan mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga melibatkan arwah–arwah para leluhur kedua belah pihak sehingga perkawinan ini mendapatkan juga restu oleh para leluhur, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa:

“Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religious), artinya perilaku hukum atau kaedah–kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶

Oleh karena itu, perkawinan mempunyai arti yang sedemikian pentingnya, maka pelaksanaannya pun senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara–upacara lengkap dengan sesajiangannya. Namun di masa sekarang banyak orang menganggapnya sebagai tahayul, tetapi hal ini masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan diberbagai macam suku, termasuk juga pada Masyarakat Dayak Bidayu Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau khususnya di bidang acara adat perkawinannya.

Para Tetua Masyarakat Dayak Bidayu Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau beranggapan bahwa untuk beralih ke status sosial yang lebih tinggi seperti perkawinan, maka harus melalui saat-saat yang penuh bahaya, baik secara nyata maupun tidak. Dengan demikian maka upacara–upacara adat perkawinan mengandung maksud untuk menolak bahaya yang mungkin akan mengancam calon mempelai yang bersangkutan, selain itu untuk mengatakan kepada khalayak ramai bahwa suatu tingkat kehidupan baru telah dicapai seseorang. Menurut Hazairin dalam bukunya “Rejang” mengemukakan bahwa :

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Alumni Bandung, 1992, Halaman 32

“Peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan– perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (welvaart) dan kesuburan(vruchtbaarheid)”.¹⁷

Sedangkan menurut A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan bahwa :

“Semua upacara–upacara itu “Rites de Passage” (upacara– upacara peralihan) yang melambangkan peralihan atau perbuatan status dari mempelai berdua; dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara–upacara tersebut menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri.

“Rites de Passage” terdiri dari tiga stadia (tahapan) yaitu:

- a. Rites de Separation (upacara perpisahan dalam status semula).
- b. Rites de Marge (upacara perjalanan ke status yang baru).
- c. Rites de Aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru).¹⁸

Menurut Soerojo Wignjodipuro, Dalam bukunya “*Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*” mengatakan ada 3 (tiga) macam system perkawinan yang dikenal dalam masyarakat, antara lain :

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang (pihak laki–laki dan perempuan) hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang sekali terdapat dalam sistem perkawinan di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, didaerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lain akan

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1998. Halaman 122.

¹⁸ Kutipan A. Van Gennep dalam bukunya Soerojo Wignjodipoero. Halaman 123

menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangan jaman ternyata, bahwa sistem exogami dalam daerah-daerah tersebut, lambat laun akan mengalami proses pelunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diberlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa akan mendekati sistem eleutherogami.

3. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogamy ataupun sistem exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena:

- Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau dengan kata lain keturunan garis lurus ke atas atau kebawah juga dengan saudara-saudara kandung, saudara

bapak atau saudara ibu.

- Musyarah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Eleutherogami ternyata yang paling luas di Indonesia; terdapat misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Bali, Lombok dan seluruh Jawa Madura.

Melihat dari 3 (tiga) sistem perkawinan yang ada, Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menganut sistem eleutherogami atau disebut kawin bebas, yaitu : “Bebas untuk memilih calon istri, baik dari keluarga sendiri (endogami) maupun luar keluarga sendiri (eksogami), tidak terikat pada hubungan darah dari satu suku atau hubungan lain”¹⁹

Dari ketiga sistem perkawinan yang telah diuraikan oleh Soerojo Wignjodipuro dapat dinyatakan bahwa sistem eleutherogami yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, di mana lebih mengutamakan atas dasar kehendak bersama dari seorang laki-laki dengan perempuan, dibebaskan untuk memilih / menentukan sendiri pasangannya, serta sesuai dengan perkembangan jaman atau arus modernisasi.

Adanya kebebasan baik dari calon istri maupun dari calon suami untuk memilih pasangan hidupnya, berarti sepanjang hal ini sesuai dengan kesusilaan setempat dan peraturan yang telah digariskan agama.

¹⁹ Tim Peneliti Fakultas Hukum Untan, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Kal-Bar, Proyek Kerja Sama BPHN, FH UNTAN, Pontianak, 1986- 1987, Halaman 64.

Yang dimaksud dengan sepanjang kesusilaan ialah perkawinan yang tidak menentukan keharusan dengan siapa saja boleh kawin dan dengan siapa tidak boleh kawin. Sedangkan sepanjang peraturan yang digariskan agama, bagi yang beragama islam dilarang kawin dengan orang-orang yang ada hubungan darah yang dekat dan langsung satu sama lain, karena hubungan periparan atau semenda dan sesusuan.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orangtuanya. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer (pengukur) dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Oleh karena itu perkawinan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan yang terdapat dalam masyarakat adat. Cara menarik garis keturunan adalah untuk menentukan seseorang itu masuk keturunan siapa, karena di dalam menurunkan seorang anak, paling sedikit harus ada dua orang yaitu seorang pria dan seorang wanita, maka cara menarik garis keturunan pada dasarnya ada dua macam yaitu :

- 1) Masyarakat Unilateral, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) saja, atau dari pihak wanita (ibu) saja. Masyarakat yang menarik garis keturunan secara unilateral ini terdiri dari :

- a. Masyarakat Patrilineal (kebapakan), yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja. Di Indonesia masyarakat seperti ini antara lain Batak dan Bali.
- b. Masyarakat Matrilineal (keibuan), yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak wanita (ibu) saja. Masyarakat seperti ini antara lain Minangkabau dan Kerinci.

2) Masyarakat Bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tuanya, baik itu melalui ayahnya maupun ibunya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masyarakat bilateral (parental) itu mengakui keturunan dari kedua belah pihak. Masyarakat yang termasuk dalam golongan bilateral (parental) itu antara lain seperti Jawa, Sunda, dan Dayak.

Meskipun seorang anak dalam keluarga telah diberi kebebasan dalam memilih pasangannya, namun pada kenyataannya pada Masyarakat Dayak Bidayu Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, orangtua tetap memegang peranan penting di dalam peristiwa perkawinan. Orangtua berperan sebagai suatu media yang memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap anak-anak mereka, apabila pasangan yang mereka pilih sudah tepat, maka pada akhirnya dapat membina suatu rumah tangga yang bahagia seperti yang dikehendaki kedua pasangan, orang tua maupun keluarga masing-masing pihak.

Apabila dilihat dari pola menetap pasangan suami istri sesudah

perkawinan maka dikenal beberapa sistem perkawinan menetap antara lain :

- a. Patrilocal yaitu pasangan pengantin sesudah perkawinan bertempat tinggal disekitar pusat kediaman kerabat si suami.
- b. Matrilocal merupakan suatu sistem perkawinan di mana setelah perkawinan pasangan pengantin bertempat tinggal disekitar pusat kediaman kerabat istri.
- c. Bilokal merupakan suatu sistem perkawinan di mana setelah perkawinan pasangan pengantin menetap secara bergantian di tempat kediaman kerabat istri dan kerabat suami.
- d. Utrolokal merupakan suatu sistem perkawinan yang memberikan kebebasan kepada pasangan pengantin untuk menentukan tempat tinggal sesudah kawin.

Pada masyarakat Dayak Bidayu setelah melaksanakan perkawinan pasangan suami dan istri tidak di tentukan oleh pihak keluarga harus tinggal di mana sebab kawin bebas ini tidak ada lagi campur tangan keluarga di dalamnya semua tergantung keputusan pasangan tersebut. Pada masyarakat adat Dayak Bidayu susunan sifat kekeluargaannya parental dalam perkawinannya menganut bentuk perkawinan bebas/mandiri, dimana setelah perkawinan suami dan istri tidak terikat kedudukannya baik dipihak keluarga istri atau keluarga suami. Karena setelah perkawinan suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing kemudian membangun rumah tangga sendiri, peran orangtua hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah

tangga keduanya dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.

B. Syarat, Larangan dan Tata Cara Adat Perkawinan "Enkasau" Pada Masyarakat Dayak Bidayu

1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan ini diperlukan dalam perkawinan adat, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam seluruh rangkaian perkawinan adat. Hal ini dikarenakan perkawinan adat memiliki dimensi religio magis, yuridis (hukum adat), sosiologis, ekonomis dan sosial budaya. Syarat-syarat perkawinan pada masyarakat Dayak Bidayu adalah sebagai berikut:

1. Umur

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan soal umur berapa seseorang bisa kawin apabila ia sudah mampu dalam segi fisik dan bisa mengemban tanggung jawab maka bisa melaksanakan perkawinan karena perkawinan bukan hanya persatuan kedua pasangan tetapi juga persatuan kedua kerabat, tetapi batasan umur yang ditetapkan oleh masyarakat Dayak Bidayu disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, "pembatasan umur minimal berapa untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan sudah memiliki kematangan berpikir, jiwa dan bisa mengemban

tanggung jawab”.²⁰ Pembatasan umur ini mengambil keuntungan dapat terhindarnya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan kematangan dalam berfikir mengenai tujuan mereka berdua bisa melaksanakan perkawinan.

2. Restu Kedua Orang Tua

Mengingat perkawinan ini tidak hanya melibatkan kedua calon pengantin tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga. Jika sudah mendapat restu dari kedua orang tua maka perkawinan bisa dilaksanakan, tetapi jika belum mendapat restu dari kedua orang tua perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Restu kedua orang tua sangat penting menurut masyarakat Dayak Bidayu sebab tanpa restu dari kedua orang tua pasangan tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan, perkawinan juga merupakan urusan kerabat keluarga dan orang tua bukan hanya kedua pasangan, maka dari itu mendapat restu itu penting agar pasangan tersebut bisa membina rumah tangga yang bahagia.

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut hukum adat tidak boleh melakukan perkawinan apabila masih ada hubungan kekerabatan, sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal (8) pasangan yang masih mempunyai ikatan pertalian darah yang terlalu dekat baik itu saudara

²⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, h.35

kandung, saudara sepupu, saudara susuan, keponakan, termasuk juga larangan kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua dan anak tiri baik itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan tetap tidak bisa melaksanakan perkawinan. Sama halnya dengan masyarakat Dayak Bidayu, pasangan tidak dapat melaksanakan perkawinan apabila masih terikat hubungan pertalian darah yang terlalu dekat, tetapi ada batas tingkatan untuk melakukan perkawinan menurut masyarakat Dayak Bidayu yaitu sampai pada sepupu tingkat 3.

Sepupu pada tingkat 3 masih bisa melaksanakan perkawinan sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Oleh sebab itu harus di lihat silsilah keluarga dan garis keturunannya, apabila masih ada hubungan pertalian darah yang dekat maka pasangan tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan dengan alasan apapun. Namun jika larangan ini tetap dilanggar maka sanksi yang diterima akan dikucilkan, menerima hukuman/sanksi adat seperti membayar denda, dan akan mendapat bencana. Hilman Hadikusuma mengatakan “segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu”.²¹ Dari pernyataan tersebut sudah dapat kita ketahui bahwa syarat perkawinan harus terpenuhi dan larangan perkawinan harus dipatuhi.

²¹ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, h.100

3. Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Bidayu

Sebelum diadakannya upacara perkawinan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan upacara berdasarkan kepada adat yang berlaku pada suatu masyarakat adat. Maksudnya adalah upacara perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum adat perkawinan yang berlaku di daerah tersebut supaya hukum adat ini dapat dipertahankan serta demi memberikan rasa hormat kepada para leluhur. Karena terdapat sebuah kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib yang akan ikut mempengaruhi jalannya kehidupan pasangan suami istri itu nantinya, agar mereka terhindar dari segala bencana yang dapat menimpa pasangan tersebut juga kerabat serta keluarganya maupun desa tempat kediaman pasangan suami istri tinggal. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan masyarakat Dayak Bidayu sebelum Upacara adat “*Enkasau*” dalam perkawinan dilaksanakan

1. Bepesik(bertanya diam-diam atau berkenalan)

Pada zaman dahulu perkawinan sering terjadi karena dijodohkan oleh masing-masing orang tua pasangan yang akan menikah. Orang tua laki-laki datang kerumah orang tua perempuan dengan membawa keluarga inti maksudnya ingin menjodohkan anaknya, jadi pasangan tersebut tidak mengenal satu sama lain hanya orang tua mereka yang mengenalkan dan juga orang tua laki-laki akan bertanya apakah lamarannya diterima atau tidak. Namun kebiasaan seperti ini kebanyakan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut, mereka mengenal sifat satu sama lain seiring berjalannya waktu setelah

mereka menikah dan jarang sekali terjadi perceraian. Karena perceraian dalam masyarakat Dayak Bidayu sangat tegas dan agama Katolik juga tidak mengenal adanya perceraian hidup, kecuali apabila ada salah satu yang meninggal. Berbeda dengan sekarang kebiasaan menjodohkan ini banyak ditinggalkan lagi sebab para remaja memilih untuk mencari pasangannya sendiri, mengenal pasangan mereka sendiri misalnya pada saat gawai (pesta panen padi).

2. *Betentu* (melamar atau bertunangan)

Betentu (melamar atau bertunangan) adalah suatu kegiatan yang diadakan sebelum melaksanakan perkawinan, dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak baik yang akan menikah maupun keluarga kedua pasangan tersebut. Acara *betentu* ini akan diberitahukan ke seluruh kampung, gunanya agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah sah dan tidak masalah jika mereka berdua sering bertemu. Pada saat melaksanakan acara *betentu* zaman dahulu ada beberapa benda-benda yang wajib di bawa ketika melaksanakan acara ini, seperti *lenyak*(benda yang terbuat dari anyaman rotan yang di ikat ke pinggang ketika akan pergi berladang), *semayok* (alat yang terbuat dari jaring gunanya untuk menangkap ikan, *seruk eji*(topi yang terbuat dari anyaman daun pandan biasa digunakan orang-orang untuk pergi ke sawah).

Selain benda-benda tersebut yang wajib dibawa pihak laki-laki ketika meminang adalah ayam jantan jago beras pulut, beras putih,

Nyok 1 botol, tembakau mako daun nipah di masukan ke dalam *lenyak* (ransel suku dayak) dan cincin sebagai bukti bahwa pasangan itu sudah bertunangan. Seiring perkembangan zaman barang-barang tersebut sudah sulit untuk di temukan, sebab sudah jarang sekali ada yang membuatnya. Di masa sekarang benda-benda tersebut bisa di ganti dengan pasta gigi, sikat gigi, sabun, handuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di masa sekarang, pakaian yang digunakan pakaian bebas rapi saat acara ini. Acara ***betentu*** dilaksanakan tergantung dari masing-masing pihak kapan persiapannya sudah lengkap dan siap untuk bertunangan. Pada saat setelah bertunangan tokoh adat masyarakat akan memberitahu kepada warganya bahwa mereka sudah resmi bertunangan, jadi warga desa tidak perlu heran lagi apabila calon mempelai laki-laki sering bertandang ke rumah mempelai perempuan.

3. Menentukan Tanggal Perkawinan

Menentukan tanggal perkawinan, tempat perkawinan dan tokoh-tokoh penting yang di undang pada saat selesai acara bertunangan. Ketika pihak laki- laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk melamar, setelah selesai acara melamar pada saat itu juga menentukan tanggal perkawinan dan menentukan tempat dilaksanakannya perkawinan, dan tamu-tamu yang akan di undang. Biasanya pelaksanaan perkawinan ini dilakukan saat gawai (pesta panen padi), untuk menghemat biaya yang akan di keluarkan saat upacara adat

perkawinan. Karena upacara perkawinan ini memakan biaya yang tidak sedikit, tamu yang di undang juga tidak mungkin sedikit akan jadi perbincangan masyarakat di desa apabila kawin adat dilaksanakan secara tersembunyi atau tanpa memanggil masyarakat sekitar. Sebab perkawinan ini tidak hanya melibatkan kedua mempelai dan keluarga masing-masing tetapi juga masyarakat ikut terlibat dalam melaksanakan perkawinan adat ini.

4. Ngaba'temi (Manggil Tamu)

Acara manggil tamu ini dimaksudkan untuk mengundang atau memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa akan ada keluarga yang melaksanakan perkawinan. Jadi masyarakat sekitar di undang untuk hadir dalam acara perkawinan tersebut. Masyarakat di undang dengan cara lisan atau dengan datang kerumahnya tidak dengan menyebarkan undangan berbentuk tulisan untuk memberitahu bahwa akan ada hajatan atau pesta perkawinan. Di setiap upacara adat perkawinan ada tokoh penting yang akan di undang jika orang tersebut tidak ada dirumah maka akan ditinggalkan sebuah anak kunci pertanda orang tersebut harus datang, apabila orang tersebut tidak datang maka perkawinannya tidak bisa dilaksanakan.

5. Masau (Perkawinan)

Setelah prosesi sebelum upacara perkawinan adat dilaksanakan, maka tibalah saat pesta perkawinannya. Sebelumnya akan ada upacara perkawinan di gereja setempat dan diumumkan perkawinan tersebut

di gereja beberapa hari sebelum pesta perkawinan. Setelah selesai acara melaksanakan upacara perkawinan adat. Di mulai dengan persiapan alat-alat untuk upacara adat perkawinan seperti:

1. Ayam jago kampung biasa (bukan ayam selasih) 1 ekor dan sudah harus bertaji (ada tanduk di kakinya). Ayam jago ini melambangkan bahwa yang menikah itu jantan, bukan duda. Ayam jago juga di lambangkan sebagai panglima atau pejantan sejati.
2. Ayam kampung 1 ekor dengan ukuran lebih kecil untuk dipanggang.
3. *Beid*(sirih) pinang di buat menjadi 7 buah, isi dari *beid*(sirih) pinang ini adalah: *mako*(tembakau), *beid* (sirih) 9 lembar laki-laki dan 7 lembar perempuan, *binyuh* (kapur sirih),,dewek mako (Daun Tembakau),*Gamer* (Gambir),pinang muda dibelah simpan sedikit untuk membuat sirih pinang ini. Sirih pinang ini melambangkan kekuatan dari kedua mempelai agar tidak goyah rumah tangganya.
4. Tempega', sejenis lemang dibuat tanpa santan kelapa sebanyak 7 buah. Setiap kali ada upacara adat, lemang tanpa santan ini wajib disajikan sebagai salah satu syarat kelengkapan upacara. Tempega' ini dibuat dimaksudkan sebagai pengganti lelah kedua orang tua yang telah membesarkan anaknya.
5. Pelita, harus pelita sumbu tidak bisa diganti dengan lilin. Pelita dengan botol kaca melambangkan langgengnya perkawinan, pelita diberi pasta gigi sedikit dan diuji mati atau tidak nyala pelita

tersebut, apabila mati maka perkawinan batal dan apabila nyala pelitanya tidak mati maka sungguh perkawinan mereka akan sampai kakek dan nenek.

6. Temulawak yang dihaluskan kemudian dicampur kemiri untuk dioleskan dikening kedua mempelai melambangkan bersatunya kedua mempelai.
7. *Bukok*(Parang) Lasak yang tidak memiliki sarung dan kepalanya terbuat dari besi, parangnya tumpul kemudian parang tersebut diletakkan di bawah tikar pandan yang dimana tikar tersebut akan diduduki kedua mempelai. Melambangkan agar kedua mempelai kuat untuk berladang, mencari rezeki untuk kehidupan rumah tangganya.
8. Nnyok(tuak adat) 1 botol. Boro'm sebagai pengganti air susu ibu yang selama ini mengalir dalam darah anaknya.
9. *Nyekak*(Beras) pulut dan beras biasa dimasukan ke dalam wadah kecil dan diberi uang pengkeras. Dimaksudkan uang pengkeras tersebut agar kedua mempelai keras semangatnya.
10. Babi 1 ekor seberat 80 kilogram dan ayam total berat harus mencapai 15 kilogram. Babi dan ayam ini nantinya akan dipotong dan di masak untuk tamu yang datang.
11. *Kuboh* 5 buah untuk laki-laki isinya 1 babi dan 1 ayam sedangkan untuk perempuan 3 buah saja yang isinya dicampur setengah babi dan setengahnya lagi ayam. Kuboh adalah makanan yang terbuat

dari ayam/babi dimasukan ke dalam bambu dan dimasak dengan nasi.

12. *Jeruk*(pekasam) ikan seluang, 9 ikan untuk laki-laki dan 7 ikan untuk perempuan. Harus terbuat dari ikan seluang tidak bisa dari ikan lain.

13. *Keredat*, nasi yang dilipat dengan daun kemudian dimasak dengan bamboo sebagai kelengkapan pejemit (sesajen).

14. *Tampi* 2 berbentuk bulat terbuat dari anyaman rotan sebagai wadah untuk menyimpan barang-barang di atas.

15. *Emak* (Tikar) yang terbuat dari daun pandan tapi daun pandan yang tidak harum,dan tidak bisa diganti dengan tikar lain. Tikar ini digunakan untuk kedua mempelai duduk bersanding saat upacara perkawinan dilaksanakan.

Kemudian semua barang-barang tersebut diletakkan disebuah tampi yang terbuat dari anyaman rotan. Setelah semua persyaratan tersebut lengkap, kedua pasangan yang duduk di atas tikar pandan tadi dan siap untuk dipomang (dido'a kan) dan yang berperan disini adalah tukang pomang (tukang do'a). Tukang pomang sendiri tidak bisa sembarangan orang, melainkan orang yang sudah turun temurun melakukan hal tersebut harus orang yang darahnya sama bisa menjadi tukang pomang.

Tukang pomang akan mengucapkan do'a-do'a menggunakan bahasa setempat yang kurang dimengerti oleh orang awam. Tukang

pomang di sini sebagai orang yang bertugas mengantar do'a-do'a kepada sang pencipta. Ayam jantan jago tadi sebagai syarat utama dalam upacara perkawinan adat ini, kedua kakinya akan di ikat dan di putar-putarkan mengelilingi kepala kedua pasangan tersebut sebanyak 7 kali sambil mengucapkan do'a-do'a. Saat ayam tersebut di putar mengelilingi pasangan itu bagian sayap bawah ayam di cabut sehelai bulunya untuk di puaskan ke kening pasangan pengantin, sebagai pertanda bahwa perkawinan mereka telah sah.

Kemudian ayam jago tersebut di potong dan darahnya di simpan di mangkuk kecil untuk di lihat apakah buihnya banyak atau sedikit, jika buihnya banyak di percaya penduduk setempat bahwa pasangan itu akan memiliki banyak anak. Setelah itu darahnya di buang dan ayam yang sudah di potong tadi dimasak dagingnya untuk dibuatkan bubur. Sebagai syarat semua orang yang hadir di upacara perkawinan harus mencicipi bubur tersebut.

Setelah semua rangkaian sebelum upacara dan sampai pelaksanaan upacara perkawinan adat tersebut selesai, selanjutnya kedua mempelai akan menggigit sebuah besi sebagai pembangkit semangat mereka berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kemudian kedua mempelai akan diberikan nasihat oleh orang tua, tokoh masyarakat setempat atau orang-orang yang sudah berpengalaman menjalani kehidupan rumah tangga. Agar ke depannya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya acara memberi

nasihat ini dilaksanakan di malam hari setelah melalui semua prosesi upacara adat. Kedua mempelai akan duduk bersanding setelah upacara adat tersebut selesai dan mulai mendengarkan nasihat-nasihat.

C. Akibat Hukum Bagi Yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat “*Enkasau*” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu

R. Soeroso mengatakan “Setiap tindakan yang bersifat penolakan baik itu penolakan terhadap hal baik ataupun penolakan terhadap hal buruk pasti akan menimbulkan akibat hukum”.²² Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Suatu hak dan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang mempunyai suatu hubungan hukum, apabila dilanggar maka akan berakibat bagi si pelanggar.

Bahwa akibat hukum adalah seluruh akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum yang telah dianggap sebagai akibat hukum. Dengan adanya pelanggaran adat maka menimbulkan suatu reaksi adat, reaksi adat tersebut merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan yang telah terkoyak di dalam dunia batin dan dunia lahir karena dunia dalam pandangan masyarakat adat dilihat sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas dan tegas, karena hukum adat bersifat mengikat. “Saat penetapanlah aturan tingkah laku adat tersebut secara tegas berwujud hukum yang positif yang disebut existensial moment”.²³

²² R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.102

²³ Ibid, h. 349

Secara formal penetapan putusan hakim adat mengandung peraturan hukum, tetapi kekuatan materilnya tidak sama. Menurut Ter Haar tebal dan tipisnya kekuatan materil hukum adat tergantung pada empat faktor yaitu:

1. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa, yang memberi stabilita kepada peraturan hukum yang di wujudkan oleh penetapan-penetapan.
2. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan
3. Seberapa jauh peraturan yang di wujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.²⁴

Apabila penetapan putusan hakim adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan materil penetapannya 100% dan sebaliknya jika tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka hasilnya sama dengan 0. Tapi hukuman atas suatu pelanggaran adat tidak hanya hukuman dari hakim adat saja, pelanggar adat juga akan mendapatkan cemoohan, dikucilkan dan dasingkan dari masyarakat. Tentu itu akan menjadi tekanan batin tersendiri bagi orang yang melanggar.

Penetapan putusan yang dibuat oleh hukum adat untuk dipatuhi masyarakatnya tidak lain adalah untuk memperbaiki perilaku masyarakatnya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal tersebut juga merupakan bentuk pemulihan keseimbangan magis dan sanksi yang diberikan gunanya

²⁴ Ter Haar, 2003, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, h.39-40

untuk menjaga ketertiban masyarakat dan sanksi sosial untuk memberikan efek jera dan rasa malu kepada seseorang yang melanggar peraturan hukum adat tersebut. Kehidupan masyarakat Dayak Bidayu tidak terlepas dari peraturan dan hukum adat yang sudah di sepakati bersama dan di buat kemudian berlaku secara turun temurun. Dengan adanya peraturan adat tersebut membuat masyarakatnya tidak bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, mereka berpedoman pada peraturan yang sudah dibuat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Peraturan adatnya disini memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakatnya. Jika masyarakat adat melanggar ketentuan adat tersebut maka akan menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat, untuk menghindari hal tersebut baik yang berhubungan dengan sesama manusia atau hal-hal ghaib di terapkan peraturan adat yang mengikat masyarakatnya guna memulihkan keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat. Apabila ada pasangan atau keluarganya tidak melaksanakan perkawinan adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku maka akan dikenakan sanksi moral seperti orang tua kedua belah pihak tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melaksanakan upacara perkawinan adat untuk anak-anak mereka. Hal ini bisa disebabkan kurangnya kemampuan dalam segi ekonomi kedua belah pihak keluarga tersebut, untuk melaksanakan upacara adat perkawinan sehingga tahapan-tahapan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tidak secara penuh dilaksanakan.

Menurut hukum adat Dayak Bidayu kedua pasangan dan kerabat keluarganya yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan secara utuh akan mendapatkan cemoohan, di sisihkan dari masyarakat karena dianggap keluarga tersebut tidak beradat sebab tidak melaksanakan upacara perkawinan adat ini secara utuh dan dipercaya bahwa perkawinan mereka tidak berkah. Masyarakat adat sangat kental budaya yang sudah ada sejak turun temurun, apabila tidak dilakukan maka sanksinya sudah ada baik berupa sanksi moral dan sanksi materil.

Sanksi moral berupa cemoohan dan kucilan dari masyarakat, sedangkan sanksi materil seseorang yang terkena sanksi adat tersebut harus mempersiapkan beberapa persyaratan untuk membayar denda adatnya berupa:

- Tempayan adat pajau (tempayan yang tidak memiliki tutup khusus untuk membayar adat) 1 buah
- Tempayan biasa 1 buah ditambah tutupnya menggunakan mangkok
- Tuak adat 1 botol
- Babi 1 ekor berat 20 kg
- Ayam kampung 3 ekor
- Telur ayam kampung 3 biji
- Beras biasa 7 kg
- Beras pulut 3 kg

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Fungsionaris Adat Dalam Melestarikan Upacara Adat “*Enkasau*” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu

Dalam mengupayakan pelestarian upacara adat perkawinan Dayak Bidayu diperlukan pengembangan dalam nilai-nilai hukum dan nilai-nilai kultural, yang bertujuan untuk melestarikan budaya dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya perbuatan melanggar hukum adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan, keseimbangan masyarakat akan melemah tidak hanya orang yang melanggar saja tapi secara keseluruhan masyarakat juga akan merasakannya. Cara tepat untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah dengan melaksanakan upaya hukum untuk memecahkan persoalan, menurut Dewi Wulansari upaya hukum adalah “upaya untuk mencegah atau memperbaiki **kekeliruan dalam suatu putusan**”²⁵ bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim adat demi menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi putusan itu tidak luput dari kekeliruan bahkan tidak mustahil bersifat memihak, agar keputusan yang diambil tersebut tidak salah dan bisa di putuskan seadil-adilnya maka putusan yang tadi sudah dijatuhkan dapat diperiksa ulang.

Oleh sebab itu setiap perbuatan melanggar hukum akibatnya tidak hanya orang yang melanggar saja tapi menyangkut seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya nilai-nilai hukum dan kultural yang bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi tidak selamanya nilai-nilai tersebut memberikan efek positif

²⁵ Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar), PT.Refika Aditama, Bandung, h.121

kepada masyarakat, namun tidak juga berarti nilai-nilai tersebut memberikan efek negatif sebab nilai-nilai itu tumbuh dalam kehidupan masyarakat, perlu dicermati sebagai bentuk tindakan menilai baik dan buruknya suatu nilai bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat.

Dengan perkembangan zaman sekarang yang sudah maju di bidang teknologi dan informasi maka nilai-nilai tersebut juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tetapi bagi masyarakat yang kehidupannya masih berpegang teguh oleh adat istiadat lama yang mereka miliki adalah adanya suatu aturan yang mencakup semua konsep budaya terhadap tingkah laku juga perbuatan manusia yang menjalani kehidupannya.

Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan upacara adat perkawinan adalah berupa diberikannya hukuman yang tegas kepada para pelanggarnya, peraturan yang di buat oleh fungsionaris adat bersifat memaksa dan memiliki kekuatan mengikat, memaksa masyarakat untuk mematuhi terutama si pelanggar tersebut. Peraturan yang bersifat memaksa ini secara jelas memberikan sanksi yang tegas. Hukum adat yang berlaku adalah keputusan yang di buat oleh fungsionaris adat, karena mengabaikan bagian tertulis yang berisi peraturan-peraturan desa.

Kebiasaan adat istiadat yang tampak lewat keterampilan, pikiran, bahasa, kesenian dan peralatan adatnya diciptakan dan digunakan, tetapi hal-hal tersebut yang dulunya tumbuh dengan baik seiring berkembangnya zaman dalam masyarakat maka mulai memudar dan berubah dari waktu ke waktu. Masyarakat suku Dayak Bidayu di Desa Entabang kebiasaan adat istiadat dan

hukum adatnya mulai memudar semakin berjalannya waktu disebabkan karena adanya perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya.

Tak jarang ditemui pemuda dan pemudi suku Dayak Bidayu tidak mengenali adat istiadatnya sendiri, demikian pula Upacara Adat Perkawinan “*Enkasau*”, suku Dayak Bidayu semakin hari semakin memudar makna dan nilai budayanya. Dikarenakan beberapa faktor seperti: faktor agama, faktor ekonomi, kesulitan mencari alat dan bahan untuk kelengkapan Upacara Adat “*Enkasau*” Dalam Perkawinan Pada suku Dayak Bidayu, dan perkembangan zaman di bidang teknologi dan informasi yang semakin pesat.

Dalam menyikapi hal ini fungsionaris adat berperan penting demi menjaga kelestarian budayanya dengan menghimbau dan melakukan musyawarah dengan masyarakatnya tentang pentingnya melaksanakan Upacara Adat “*Enkasau*”, Dalam Perkawinan Pada suku Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau walaupun mengalami beberapa perubahan. Kerjasama masyarakat dalam melestarikan Upacara Adat “*Enkasau*” ini juga diperlukan, adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga budaya ini agar upacara adat perkawinan ini tidak punah. Generasi- generasi muda diperlukan dalam kerjasama pelestarian budaya ini agar ketika para orang-orang tua sudah banyak meninggal generasi muda bisa melanjutkan budaya dan kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan sejak dulu.